

**Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir (Studi Kasus Proyek Normalisasi  
Banjir Kanal Barat dan Kali Garang Kota Semarang)**

**Oleh :  
Putri Widyanti, Kismartini, Maesaroh**

**Jurusan Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*Normalization Banjir Kanal Barat dan Kali Garang is one of three components flood control taken government to flood control annually almost always in some areas in the city of Semarang. The purpose of Normalisasi Banjir Kanal Barat dan Kali Garang itself is to increase the capacity to accommodate so as to discharge of water from the river is three times Kreo, Kripik and Garang. The aim of this research is trying to answer questions about Normalisasi Banjir Kanal Barat dan Kali Garang and analyzes factor supporting and inhibitors. Research methods used in this research using a qualitative research with methods of descriptive qualitative, which aims to describe explained and analyzed*

*The work of normalization work is conducted by Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana by the contractor would work, Brantas Abipraya and Wijaya Karya Joint Operation and consultan inspectorship CTIE and associated. And departement. of PSDA an ESDM to creating land project. In construction work normalization begins november 2010 and to be completed in november 2013. After normalization Normalisasi Banjir Kanal Barat dan Kali Garang, so far the flood canal the west has been able to improve the capacity of a discharge of water which had been 300-400 m<sup>3</sup>/second to 730m<sup>3</sup>/second, flood control, other than a benefit this normalization of benefits in social sector, economy, the environment and for cultural city people Semarang especially. Supporting factors and inhibitors of the implementation of this protocol identified through five Adil Najam that is, namely content, context, commitment, capacity, and client and coalition of stekeholder involved, namely the government, private and public. Of the net content, Normalisasi Banjir Kanal Barat dan Kali Garang perceived capable of being a response to the issue of floods in society. But normalization this is not the only way to control the flood, there should be support the optimization of the function drainages the city. In context there have been the division of tupoksi clear between implementor, it's just coordination they do sometimes take a long time, and less efficient hence there must be a good time managent. Commitment, of the net private sector (contractors) has been able to reach its commitments to finish the job on time while the government in the provision of compensation tali asih is deficient according to the rules imposed so in the future needed the system controls more restrictive. In capacity, implementor of the policy is, who competent as Balai Besar Wilayah Sungai and great contractors. And to the factors of client and coalitions, actually either the government, private, community support each other, but here, public awareness to maintain clean environment is still less so fore requires explicitness the rules of the government in giving sanctions on those who do not pro-activ in keeping clean environment.*

*Keyword : Policy Implementation, River Normalization*

## ABSTRAK

Normalisasi Banjir Kanal Barat dan Kali Garang merupakan satu dari tiga komponen pengendalian banjir yang diambil pemerintah guna pengendalian banjir yang hampir tiap tahunnya selalu menggenangi beberapa daerah di kota Semarang. Tujuan dari Normalisasi Banjir Kanal Barat dan Kali Garang itu sendiri adalah untuk meningkatkan kapasitas debit air sehingga mampu untuk menampung air dari tiga sungai yaitu kali Kreo, kali Kripik, dan kali Garang. Tujuan dari penelitian ini adalah berusaha menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana Implementasi Normalisasi Banjir Kanal Barat dan Kali Garang serta Menganalisa Faktor Pendukung dan Penghambat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan dan menganalisa.

Pekerjaan normalisasi ini dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana dengan kontraktor Waskita Karya, Brantas Abipraya dan Wijaya Karya joint operation dan konsultan Pengawas CTIE dan *associated*. Serta Dinas PSDA dan ESDM untuk pengadaan lahan normalisasi. Secara konstruksi pekerjaan normalisasi dimulai November 2010 dan selesai pada November 2013. Pasca normalisasi banjir kanal barat dan kali garang, sejauh ini Banjir kanal Barat telah mampu untuk meningkatkan kapasitas debit air yang semula 300-400 m<sup>3</sup>/detik menjadi 730m<sup>3</sup>/detik, selain manfaat pengendalian banjir, normalisasi ini memberikan manfaat pada sektor sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan budaya bagi masyarakat Kota Semarang khususnya. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dari implementasi ini diidentifikasi melalui lima protocol Adil Najam yaitu, yaitu *content*, *context*, *commitment*, *capacity*, dan *client and coalition* dari stakeholder yang terlibat yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dari faktor *content*, Normalisasi Banjir kanal Barat dan Kali Garang dirasakan mampu menjadi jawaban atas isu banjir yang ada di masyarakat. Namun normalisasi ini bukan satu-satunya cara untuk mengendalikan banjir, harus ada dukungan optimalisasi fungsi drainase kota. Secara *context* telah ada pembagian tupoksi yang jelas diantara implementor, hanya saja koordinasi yang mereka lakukan terkadang membutuhkan waktu yang lama sehingga kurang efisien, oleh karena itu perlu ada *managent* yang baik. Dari faktor *commitment*, pihak swasta (kontraktor) telah mampu mencapai komitmennya untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sedangkan pemerintah dalam pemberian kompensasi tali asih kurang sesuai dengan aturan yang diberlakukan sehingga kedepannya dibutuhkan sistem kontrol yang lebih ketat. Secara *capacity*, implementor dari kebijakan ini merupakan pihak-pihak yang berkompetensi, seperti Balai Besar wilayah Sungai dan kontraktor-kontraktor besar. Dan untuk faktor *client and coalitions*, sebenarnya baik pemerintah, swasta, masyarakat saling mendukung, namun disini kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan masih kurang sehingga kedepan perlu adanya ketegasan aturan dari pemerintah dalam memberikan sanksi bagi mereka yang tidak pro-aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Keyword : Implementasi Kebijakan, Normalisasi Sungai

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Banjir merupakan masalah yang sering melanda Kota Semarang. Kota Semarang dengan kondisi topografi yang datar dan rendah di wilayah utara dan yang berupa pegunungan di wilayah selatan menjadikan salah satu penyebab banjir di Semarang. Pada musim penghujan, banjir lebih sering disebabkan oleh banjir kiriman yang terjadi karena lahan hulunya menerima hujan besar yang mengalir ke daerah hilirnya. Banjir ini dapat juga terjadi di Sungai ketika alirannya melibihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Sedangkan pada musim kemarau, banjir lebih disebabkan oleh adanya air laut pasang yang lebih populer disebut rob. Setiap musim penghujan, hampir sebagian besar wilayah Kota

Semarang digenangi air. Sejarah menunjukkan bahwa pengalaman terjadinya bencana banjir besar di Kota Semarang pada tahun 1973, 1988, 1993 dan tahun 1990, dimana kali garang (banjir kanal barat) meluap sehingga daerah disekitarnya disapu banjir bandang yang begitu dahsyat. Ratusan rumah didaerah Sampangan dan sekitarnya tenggelam oleh tingginya banjir yang mencapai 2 meter, menewaskan 47 orang, merobohkan 25 rumah, dan mengakibatkan 126 rumah dan 15 bangunan fasilitas umum rusak. Sungai Banjir Kanal merupakan titik pertemuan dari tiga aliran sungai yaitu Kali Kreo, Kali kripik dan Kali Garang sehingga bila musim hujan maka aliran dari hulu tersebut mengalir menuju hilir Banjir Kanal Barat sedangkan kapasitas debit air Banjir Kanal Barat tidak mampu untuk menampung debit air dari tiga sungai tersebut sehingga menyebabkan air meluap dan banjir. Berdasarkan pengalaman tersebut akhirnya pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan kebijakan pengendalian banjir melalui tiga komponen yang salah satunya merupakan Normalisasi Banjir Kanal Barat dan Kali Garang. Normalisasi Kanjir Kanal Barat dan Kali Garang merupakan proyek dari pemerintah pusat untuk mengendalikan banjir. Pekerjaan teknis seperti pengerukan, pelebaran dilakukan guna meningkatkan kapasitas debit air Banjir Kanal Barat sehingga mampu untuk menampung aliran dari tiga sungai diatas dan air tidak meluap ke daratan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/Prt/M/2011 pasal 1 ayat 13 Tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air, yang berwenang untuk melakukan pengelolaan Sumber Daya Air adalah UPT pusat atau daerah, dan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juwana, Satuan Kerja Non Vertikal Pembangunan waduk Jatibarang lah yang diberikan perintah dan wewenang untuk melaksanakannya. Selanjutnya BBWS pemali Juana SNVT waduk Jatibarang bersinergi dengan kontaktor pelaksana yaitu Waskita Karya, Brantas Abipraya dan Wijaya Karya joint operation dan konsultan Pengawas CTIE dan *associated* untuk mengerjakan teknis proyek. Selain pekerjaan teknis proyek, ada juga pekerjaan non teknis yang kewenangannya diberikan kepada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang guna penyediaan lahan untuk proyek dan melakukan pembayaran ongkos ganti rugi bongkar bangunan dan tali asih berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 593/593. Namun kenyataannya dilapangan tidak menunjukan bahwa sesuai dengan regulasi.

Selain untuk mencapai tujuannya sebagai pengendali banjir melalui peningkatan kapasitas debit air, normalisasi banjir kanal barat dan kali garang juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sosial, lingkungan, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat Kota Semarang secara khususnya. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti mengenai bagaimana **Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir (Studi Kasus Normalisasi Banjir Kanal Barat dan Kali Garang Kota Semarang) dan Menganalisis Faktor –Faktor pendukung dan penghambat.**

## **B. TUJUAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

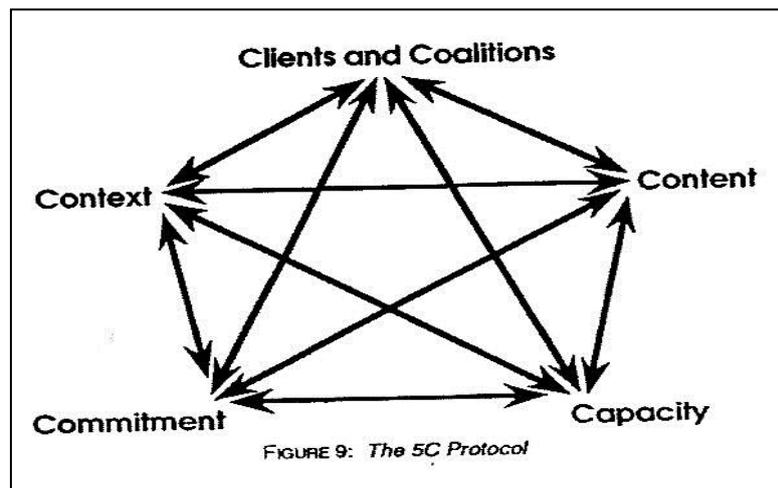
1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir (Studi Kasus Normalisasi Banjir Kanal Barat dan Kali Garang Kota Semarang).
2. Untuk Menganalisis Faktor–Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat.

## **C. TEORI**

Implementasi pada prinsipnya adalah proses eksekusi dari rencana atau kebijakan yang telah disusun dan ditetapkan. Tanpa adanya implementasi, sebaik apapun sebuah perencanaan tidaklah akan menghasilkan suatu hasil dan tercapai tujuannya. Seperti yang diungkapkan oleh Wayne Parson “Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut” (Parsons,1995:466). Senada dengan Parson, Riant

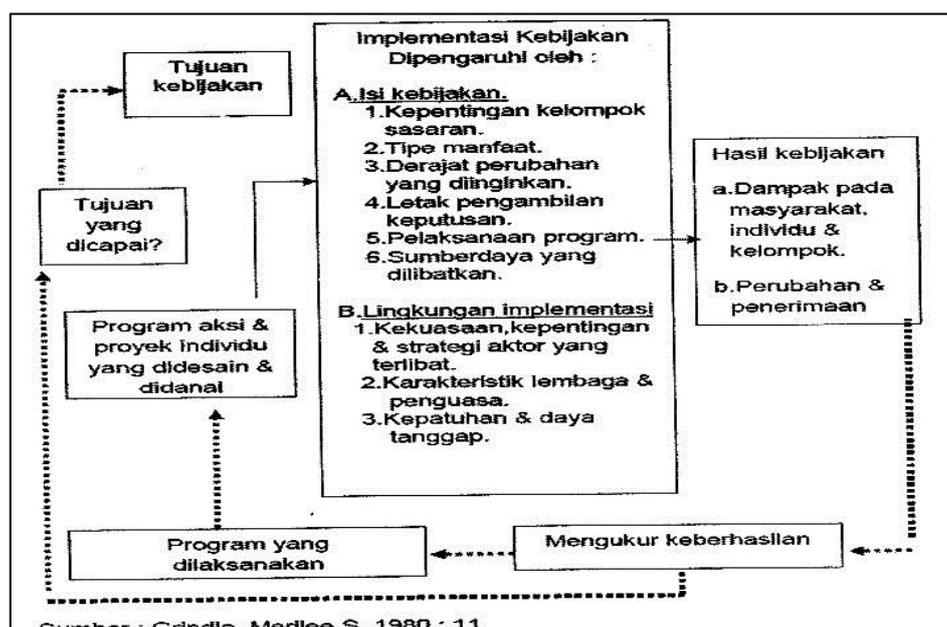
Nogroho mengungkapkan bahwa “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya” (Nugroho,2005:158). Dalam mengidentifikasi implementasi ini penulis melihat dari proses, aktor dan hasil. Implementasi kebijakan sendiri bisa dilihat dari sisi proses implementasi sebuah kebijakan dan hasil yang diperoleh dari hasil penetapan dan pelaksanaan atau implementasi kebijakan tersebut. Seperti yang diungkapkan Budi Winarno, “Implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun hasil” (Winarno,2002:102). Selanjutnya untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung, peneliti menggunakan lima protokol Adil Najam yaitu *content*, *context*, *commitment*, *capacity* dan *client and coalition*, dan didukung dari teori Grindle yang juga menyinggung mengenai isi kebijakan, dan konteks kebijakan.

### Faktor yang mempengaruhi implementasi Adil Najam



Sumber : Jurnal Adil Najam

### Faktor yang mempengaruhi implementasi Implementasi Marilee S. Grindle



Sumber : Grindle, Marilee S. 1980 : 11.

Sumber : Grindle dalam Riant Nugroho

## D. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan dan menganalisa fokus penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi serta faktor pendukung dan penghambat. Lokus penelitian yang diambil peneliti adalah lokasi dari banjir kanal barat itu sendiri dan situs penelitiannya berfokus pada implementor yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juwana, Satuan Kerja Non Vertikal Pembangunan Waduk Jatibarang. Teknik pemilihan informan yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *purposive sample*, artinya pengambilan dengan sengaja didalam klaster batik untuk memperoleh *key informan* yaitu orang-orang yang mengetahui dengan benar atau yang terpercaya sedangkan untuk memperoleh data kualitatif, tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan teknik *snowballing* dimana pertama peneliti menentukan satu orang untuk dijadikan informan, kemudian selanjutnya orang tersebut yang akan menunjuk orang lain untuk kita jadikan informan, baik didalam lingkup situs penelitian maupun masyarakat di sekitar lokasi banjir kanal barat. Begitu seterusnya, sampai data atau informasi yang diperoleh dirasa sudah cukup oleh peneliti. Subyek penelitian yang dimaksud peneliti disini adalah anggota-anggota klaster. Selanjutnya data yang telah didapat disajikan, direduksi hingga dapat ditarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. HASIL IMPLEMENTASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka :

1. Proses kebijakan. *Pertama*, Pemerintah mengambil tindakan untuk melaksanakan kebijakan pengendalian banjir di Kota Semarang melalui tiga komponen yang salah satunya merupakan normalisasi banjir kanal barat dan kali garang yang bertujuan untuk pengendalian banjir melalui peningkatan kapasitas debit air sungai, sehingga banjir kanal barat mampu menampung air yang berasal dari hulunya yaitu tiga aliran sungai yaitu Kreo, kripik dan Garang. Masyarakatpun mendukung dan memahami manfaat dari kegiatan tersebut. Dukungan masyarakat dapat dilihat dari masyarakat tidak menolak dan ikut serta menjaga kondusifitas lingkungan proyek normalisasi dengan menjaga keamanan barang material dan keamanan dari orang-orang yang berniat merusak. *Kedua*, Pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan, yaitu BBWS Pemali-Juana SNVT PWJB (Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatibarang) melakukan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk pelekaksanaan kegiatan teknis (konstruksi) dan non teknis (sosialisasi, penyediaan lahan). *Ketiga*, Birokrat pelaksana siapa menjadi pelaksana kebijakan. Normalisasi ini dilaksanakan oleh SNVT PWJB (Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatibarang) Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana dan pihak swasta (kontraktor pelaksana) diantaranya Waskita Karya, Brantas Abipraya Wijaya Karya jointoperation danKonsultan Pengawas CTIE dan *associated* untuk perkerjaan teknis konstruksi.
2. Aktor implementasi terdiri dari :
  - a) Pemerintah : SNVT PWJB BBWS Pemali Juana yaitu pihak yang diberikan mandat oleh pemerintah pusat sebagai pemilik pekerjaan (normalisasi) dan juga sebagai pihak yang bertanggung jawab selama proses implementasi berlangsung. Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang yaitu pihak yang diberikan tugas untuk membantu memfasilitasi pengadaan lahan guna normalisasi, serta pihak yang berhubungan langsung perihal pendanaan dan pengurusan pemberian ongkos ganti rugi atau kompensasi tali asih kepada beberapa masyarakat dan PKL disekitar bantaran yang terkena dampak normalisasi.

- b) Swasta : pihak yang diberikan wewenang sebagai pelaksana teknis proyek. Dalam hal ini aktor dari swasta adalah kontraktor dari Waskita Karya, Brantas Abipraya dan Wijaya Karya jointoperation dan konsultan Pengawas CTIE dan *associated*.
  - c) Masyarakat : masyarakat sebagai pihak yang mendapat manfaat dari normalisasi dan pihak yang turut mendukung kebijakan.
3. Hasil Implementasi terdiri dari :
- a) Output : keluaran dari adanya proyek normalisasi bajir kanal barat dankali garang adalah terealisasinya Normalisasi Bajir Kanal Barat dan Kali Garang yang notabene untuk menindak lanjuti Kota Semarang yang tiap tahunnya selalu tergenang banjir.
  - b) Outcome : pengendalian banjir melalui peningkatan kapasitas debit air sungai yang semula 300-400 m<sup>3</sup>/detik menjadi 730m<sup>3</sup>/detik sehingga mampu untuk menampung air dari tiga sungai yaitu kali Kreo, kali Kripik, dan kali Garang.
  - c) Impactnya : meningkatnya manfaat sosial, lingkungan dan ekonomi melalui :
    1. Meningkatnya kesehatan lingkungan karena sungai lebih bersih.
    2. Bantaran sungai kini menjadi objek wisata sehingga menumbuhkan peluang secara ekonomi bagi masyarakat dengan berjualan di sekitarnya dan menumbuhkan peluang jasa parkir oleh masyarakat setempat.
    3. Masyarakat menghabiskan waktu sore untuk duduk-duduk disekitar bantaran sehingga menjadi tempat untuk bersosialisasi.
    4. Diadakan event-event budaya seperti parade warak ngendog. Dihari minggu juga biasa diadakan senam disana.
    5. Tinjauan studi banding dari malaysia dan provinsi lain mengenai pengelolaan sungai.

## B. ANALISIS

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Normalisasi Banjir Kanal Barat dan kali Garang dilihat dari tiga fenomena, yaitu proses, aktor dan hasil. Proses, aktor dan hasil dari implementasi Normalisasi Banjir Kanal Barat dan kali Garang dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat, yaitu sebagai berikut :

Faktor-faktor pendukung :

- a. *Content*. Isi kebijakan yaitu normalisasi banjir kanal barat dan kali garang mampu mewakili dan menjawab isu yang ada dimasyarakat. Normalisasi banjir kanal barat dan kali garang merupakan kebijakan yang diambil pemerintah karena adanya isu banjir yang terjadi hampir setiap tahunnya di Kota Semarang. Stakeholder yang terlibat dalam implementasi normalisasi banjir kanal barat dan kali garang juga telah mengetahui dan memahami tujuan dari normalisasi banjir kanal barat sehingga mereka saling bersinergi untuk menjalankannya dengan baik.
- b. *Context*. Pembagian tupoksi antara implementor sudah baik dan jelas. Untuk tupoksi dari SNVT PJWB Balai besar Wilayah Sungai Pemali-Juana adalah mengerjakan pengelolaan sumber daya air dalam hal ini konstruksi. Sedangkan untuk Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang melaksanakan perjanjian kerjasama pengadaan tanah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan sumber daya air terpadu dan pengelolaan banjir di Kota Semarang LOAN IP-534. Sebelum pelaksanaan kebijakan, pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu memahami dengan jelas apa tujuan dari normalisasi banjir kanal barat dan kali garang. Dengan pendekatan melalui sosialisasi akhirnya masyarakat yang sempat kontra merubah menjadi mendukung. Selain itu pekerjaan sangat diawasi oleh Jepang

sehingga bila terdapat takaran material yang tidak pas harus dibongkar karena mendapat bantuan dari Jepang melalui LOAN IP-534 sebesar Rp 288,8 milyar. Sehingga *controlling* konstruksi benar-benar diperhatikan.

- c. *Commitment*. Pemerintah dan swasta (kontraktor) menunjukkan komitmennya melalui pembuktian Pekerjaan Konstruksi selesai tepat waktu dan secara teknis pekerjaan (konstruksi) berjalan sesuai prosedur dan terkontrol sehingga . Normalisasi banjir kanal barat dan kali garang dijadwalkan dikerjakan mulai dari November 2009 s/d November 2010 dan terealisasi sesuai jadwal.
- d. *Capacity*. Dikerjakan oleh implementor yang memiliki kapasitas untuk pengerjaan pengendalian banjir. Institusi yang mengerjakan sudah sesuai dengan regulasi yaitu UPT Balai Besar Wilayah Sungai Pemali – Juana (BBWS Pemali-Juana) dan dengan kontraktor pelaksanaanya berasal dari kontraktor besar dan mumpuni yaitu Waskita Karya, Brantas Abipraya Wijaya Karya joint operation, konsultan pengawas CTIE dan *associated* serta serta didukung oleh Dinas PSDA dan ESDM kota Semarang untuk pengadaan lahan.
- e. *Client and coalition*. Kesamaan pandangan antar stakeholder mengenai menyikapi banjir yaitu meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat untuk mau bersama-sama menjaga lingkungan dan kesadaran untuk hidup berdampingan dengan sesama dan alam. Hubungan antar stakeholder dalam implementasi normalisasi banjir kanal barat dan kali garang saling mendukung. Masyarakat sebagai objek kebijakan sangat memberikan dukungan dengan menjaga kondusifitas area implementasi. Pihak swasta yaitu pihak kontraktor juga sangat mendukung, dengan terbukti mampu bekerja sama dengan pemerintah untuk menyelesaikan proyek secara tepat waktu sehingga secara tidak langsung mamapu mencapai efisiensi waktu dan biaya. Sedangkan dukungan antar sektor pemerintahan yaitu pada komitmen untuk menjalankan tupoksi dan berusaha untuk saling berkoordinasi.

Faktor-faktor penghambat :

- a. *Context*, yaitu koordinasi antar sektoral yang membutuhkan waktu cukup lama seperti adanya PKL yang belum pindah ketika proyek konstruksi sudah dimula padahal proyek harus segera dilaksanakan karena terkait efiesinsi waktu dan efisiensi lainnya. Untuk pengeloaan PKL dalam hal ini ada tugas dari Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.
- b. *Commitment*, yaitu terhambat dan tertundanya realisasi pembayaran tali asih. Pembayaran tali asih seharusnya selesai pada tahun anggaran APBD 2009 dan 2010, namun data dilapangan menunjukkan pembayaran tali asih baru pada tahun 2011. Selain itu meski pemerintah telah melaksanakan kebijakan terbaik dengan implementor yang terbaik juga, namun tidak diimbangi kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan hidupnya.
- c. *Client and Coalition*, Belum ada pembagiaan tugas pengelolaan antar sektor pemerintah pasca normalisasi juga merupakan penghambat. Sejauh ini tanggung jawab pengelolaan masih menjadi tanggung jawab BBWS, baik dari pembersihan lingkungan sungai dan bantaran, perawatan lampu jalan disepanjang bantaran, perawatan fungsi sungai lainnya. Selain itu penghambat lainnya adalah masyarakat belum sepenuhnya sadar untuk menjaga kebersihan lingkungan (tidak membuang sampah disungai).

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Proses implementasi normalisasi banjir kanal barat dan kali garang, pemerintah sebagai implementor menerima dan menjalankan tugas untuk melakukan normalisasi banjir kanal barat dan kali garang, stakeholder yang terlibat (pemerintah, swasta, masyarakat) mampu bersinergi untuk saling mendukung. Aktor dari implementasi ini juga menerapkan prinsip paradigma good governance, yaitu tidak hanya pemerintah yang terlibat, dan juga didukung oleh swasta dan masyarakat. Untuk hasil yang dicapai, Pasca normalisasi banjir kanal barat dan kali garang, sejauh ini Banjir kanal Barat telah mampu untuk meningkatkan kapasitas debit air yang semula 300-400 m<sup>3</sup>/detik menjadi 730m<sup>3</sup>/detik, sehingga Banjir Kanal Barat mampu menampung aliran air dari tiga alirannya hulunya yaitu Kali Kreo, Kali Kripik dan Kali Garang. Selain manfaat pengendalian banjir, normalisasi ini memberikan manfaat pada sektor sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan budaya bagi masyarakat Kota Semarang khususnya. Normalisasi Banjir kanal Barat dan Kali Garang dirasakan sejauh ini mampu menjadi jawaban atas isu banjir yang ada di masyarakat. Namun normalisasi ini bukan satu-satunya cara untuk mengendalikan banjir, harus ada dukungan optimalisasi fungsi drainase kota dan baik pemerintah, swasta, masyarakat harus saling mendukung, dengan menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai yang menyebabkan aliran drainase tersumbat, dan perlu ada kesadaran lebih untuk tidak mengalihfungsikan drainase kota seperti menutup bagian atas sungai atau selokan untuk kepentingan pribadi seperti berjualan, agar pemerintah dapat selalu mengontrol apakah alirannya sesuai dan tidak ada penyumbatan.

### **B. REKOMENDASI**

#### 1. Memaksimalkan fungsi drainase kota.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa normalisasi banjir kanal barat dan kali garang ini bertujuan untuk pengendalian banjir melalui peningkatan kapasitas debit air sungai yang semula 300-400 m<sup>3</sup>/detik menjadi 730m<sup>3</sup>/detik sehingga mampu untuk menampung air dari tiga sungai yaitu kali Kreo, kali Kripik, dan kali Garang dan diharapkan mampu untuk pengendali banjir. Namun langkah normalisasi ini bukan satu-satunya cara untuk mengatasi banjir di Kota Semarang. Kota Semarang mempunyai lima fungsi drainase yang harus diperhatikan, dikelola dan dimaksimalkan fungsinya agar mampu bersinergi dengan banjir kanal barat dan kali garang dalam upaya mengatasi banjir di Kota Semarang. karena menurut sumber informan dari Dinas PSDA dan ESDM, fungsi drainase di Kota Semarang belum berjalan maksimal, dan bila fungsi drainase di Kota Semarang belum berjalan maksimal maka potensi banjir masih besar.

#### 2. *Time management* yang baik

Fungsi ini akan mempengaruhi kedisiplinan dan juga capaian dari pekerjaan, dalam kasus ini, bila *time management* terlaksana dengan baik maka akan meminimalisir molornya suatu pekerjaan seperti yang terjadi dalam normalisasi banjir kanal barat dan kali garang yaitu PKL yang belum pindah ketika proyek konstruksi sudah dimulai padahal pekerjaan harus segera dilaksanakan. Hal seperti itu akhirnya mampu menghambat efisiensi dari suatu pekerjaan, untuk itu kedepannya untuk proyek selanjutnya dapat dilakukan pengelolaan waktu yang baik.

#### 3. Sistem kontrol yang lebih ketat

Tidak terealisasinya pembayaran tali asih sesuai dengan aturan yaitu dengan tidak adanya pembayaran tali asih untuk tahun anggaran APBD 2009 dan 2010 oleh Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang menunjukkan bahwa kontrol terhadap pemerintah kurang baik. Sehingga seharusnya kontrol harus rutin dilakukan baik oleh instansi lain yang terkait maupun dari masyarakat sendiri.

#### 4. Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi ini berlaku bagi keseluruhan stakeholder, penerapan sanksi ini bisa diterapkan dalam permasalahan tidak terealisasinya pembayaran tali asih sesuai dengan aturan yaitu dengan tidak adanya pembayaran untuk tahun anggaran APBD 2009 dan 2010 maupun sanksi untuk masyarakat yang tidak ikut serta menjaga lingkungan seperti membuang sampah dan menutup saluran drainase untuk kepentingan-kepentingan pribadi.

#### 5. Kebijakan lanjutan

Dalam Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yaitu pada pasal pasal 29 ayat 1(f) disebutkan bahwa dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, namun aturan tersebut hanya seperti angin lalu karena tidak ada tindakan tegas dari aparat pemerintah bagi mereka yang melanggar, dan tidak ada sanksi yang membuat jera bagi mereka yang membuang sampah sembarangan. Untuk itu dirapakan pemerintah dapat menepatkan sanksi yang membuat jera, berkaca dari Negara Singapura, setiap orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya akan diminta membayar denda sebesar 500 dollar Singapura (lima juta rupiah) dan 5000 dollar Singapura untuk mereka yang terus menerus membuang sampah sembarangan dan peraturan tersebut benar-benar ditegakkan sehingga mereka akan berpikir dua kali untuk membuang sampah sembarangan. Bila pemerintah Indonesia berani mengambil keputusan unruk menetapkan sanksi yang bisa memnuat masyarakat jera seperti itu, maka kemungkinan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat Indonesia.

#### 6. Penetapan Job desk

Penetapan job desk yang sesuai akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu pekerjaan. Pengelolaan sungai banjir kanal barat dan kali garang pasca normalisasi tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh salah seorang maupun satu instansi saja. Untuk itu penetapan job desk terkait pengelolaan sungai banjir kanal barat dan kali garang maupun lingkungan sekitarnya pasca normalisasi harus segera dilakukan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. (2005). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Alex Media Komtindo,
- Parsons, Wayne. *Publik Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*
- Parsons, Wayne. *Publik Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.